

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG FPU UNAMID

Formed Police Unite yang dapat juga di sebut dengan FPU adalah satuan tugas Polri yang berada di biro misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri tetapi FPU Indonesia berada langsung di bawah PBB, FPU Indonesia aktif mengirimkan pasukan perdamaian pada tahun 2008 di misi UNAMID yang berada di Sudan Afrika, pasukan FPU Indonesia memiliki tugas yang di berikan langsung oleh PBB yaitu melindungi warga sipil dan fasilitas PBB, mendukung kegiatan oprasi kepolisian di daerah misi dan menjaga ketertiban serta perjanjian yang telah di buat. Satgas FPU memiliki kemampuan khusus seperti penanggulangan Huru Hara, pencarian dan penyelamatan, investigasi dan intelijen, penembak jitu, mekanik, memasak, komunikasi elektronik, kedokteran dan masih banyak lagi kemampuan yang di miliki oleh pasukan FPU, dalm satu kontingen FPU terdapat 140 unite kepolisian yang di lengkapi dengan peralatan khusus yang di tunjang untuk keperluan pada saat di daerah penugasan yang rawan konflik.

Pasukan FPU di bedakan menjadi 2 yaitu pasukan FPU dari instansi Polri dan pasukan FPU dari instansi TNI kedua pasukan ini memiliki tugas mereka masing masing yang telah diberikan oleh PBB yaitu Pasukan FPU dari Polri itu berikan tugas melindungi warga sipil dan fasilitas PBB, mendukung kegiatan oprasi kepolisian di daerah misi dan menjaga ketertiban serta perjanjian yang telah di buat sedangkan pasukan FPU TNI bertugas untuk memberikan bantuan berupa bantuan militer untuk mengawasi serta menjaga kelancaran misi padasaat terjadinya konflik.

Pada saat penugasan misi oleh PBB bukan hanya pasukan FPU yang dikirim ke daerah konflik untuk menyelesaikan misi perdamaian tetapi aja IPO atau Individual Police Officer yang di kirim oleh PBB dalam misi perdamaian. Dapa saat PBB memberikan Tugas misi perdamaian negara yang di berikan mandat akan di berikan dua opsi untuk alusista dan perlengkapan saat misi yaitu PBB menyewa barang dari indonesia untuk misi perdamaian atau PBB memberikan fasilitas kepada anggota FPU, itu semua di tentukan oleh negara yang mengirim pasukan ke misi perdamaian. Untuk menjadi seorang FPU harus memiliki

kemampuan bahasa yang sangat baik dan memiliki kemampuan lebih seperti ahli dalam menembak, ahli dalam menyusun strategi dan masih banyak lagi.

B. Partisipasi FPU Indonesia Pada misi PBB UNAMID

Pada tanggal 29 Februari tahun 2008 Indonesia berhasil menambahkan 3 Personel Kepolisian Republik Indonesia untuk pertama kalinya bergabung dengan misi penjagaan perdamaian PBB ke misi UNAMID di darfur yaitu AKBP Krishna Murti, S.I.K., M.Si, AKBP Tjuk Winarko, S.I.K., S.H., dan AKBP Gede Surdana, Spd. Ketiga personil bertindak sebagai Police Adviser yang bertugas untuk:

- memonitoring pelaksanaan penegakan hukum
- melaksanakan program peluncuran senjata
- memonitoring perjanjian damai Darfur diantara kedua pihak yang berkonflik
- memastikan keamanan dan keselamatan para pengungsi korban konflik di area pengungsian

selain bertugas bertugas melaksanakan mandat sebagaimana tersebut ketiga personal dimaksud mendapatkan tugas khusus dari Mabes Polri untuk melakukan assesement dalam rangka menempatkan Satuan Tugas Garuda Bayangkara Formed Police Unit (FPU) yang di tugaskan dalam misi UNAMID.

Pada tanggal 12 Oktober 2008 Satuan Tugas Garuda Bayangkara Formed Police Unit (FPU) tiba di Darfur, Sudan dan merupakan kontingan pertama Indonesia yang berjumlah 140 personal yang di pimpin oleh Kombes Pol. Drs. Jhoni Asadoma, M.Hum serta berfungsi untuk melindungi rakyat sipil serta menjaga aset dan Personel PBB dalam melaksanakan Tugas Operasi Kepolisian yang membutuhkan penanganan khusus.

Total personil pasukan Indonesia yang telah di tugaskan pada Misi PBB UNAMID yaitu sebanyak 12 Kontingen Formed Police Unit (FPU) sejumlah 1.680 personil (1.645 polki dan 35 polwan) Sebagai anggota FPU dan 91 personel (61 polki dan 30 polwan) sebagai personal IPO. Misi PBB UNAMID merupakan misi kerjasama antara PBB dan Uni Afrika yang secara formal di dukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769 yang ditetapkan pada tanggal 31 juli 2007 yang saat ini di perbaharui dengan Resolusi nomor 2363 (29 juni 2017) berjuang untuk mengamankan wilayah Darfur, Sudan yang tengah di landa Konflik bersenjata Berkepanjangan dengan korban jiwa saat itu menurut WHO mencapai 500.000 Orang. Tugas

UNAMID seperti yang tertuang dalam mandat baru adalah melindungi masyarakat sipil dan memberikan bantuan kemanusiaan, memonitor perjanjian perdamaian antara pihak yang berselisih, mendukung mediasi penyelesaian konflik antar kelompok, serta membantu pemerintah Sudan untuk mengembalikan para pengungsi ke asal tempat tinggal secara sukarela.

Berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2559 tanggal 22 Desember 2020 hasil dari negosiasi antara pemerintah Sudan dengan UNAMID selama tanggal 22 sampai dengan 25 Oktober 2020 antara lain sebagai berikut :

- A. memutuskan untuk mengakhiri mandat UNAMID per 30 Desember 2020
- B. memohon sekjen PBB untuk mulai merepatriasi personal UNAMID pada tanggal 1 Januari 2021 dan menyelesaikan penarikan personel UNAMID baik yang berseragam dan sipil pada 30 Juni 2021, selain yang diperlukan untuk pembubaran misi
- C. memutuskan untuk memberikan izin pada personal UNAMID yang ditugaskan untuk melindungi personel, fasilitas dan aset-aset PBB selama masa penarikan atau penutupan misi UNAMID

Satuan tugas Garuda Bayangkara FPU 12 UNAMID yang saat ini dipimpin oleh Kombes Pol. Muhammad Fachry, S.I.K., M.Si., akhirnya dipercaya oleh pemerintah Sudan untuk menjadi Pasukan Guard Unit (GU) pada masa transisi penutupan misi PBB di Sudan sampai dengan Desember 2021 yang memiliki tugas untuk:

- Melindungi Personal PBB di Log Base Elfasher
- Melindungi aset-aset PBB khususnya (Senjata dan Amunisi)
- Melindungi reputasi PBB

C. Dasar-dasar

- Memorandum of Understanding (MoU) FPU Indonesia antara pemerintah Indonesia dan PBB nomor DFS/UNAMID/INDO/01 tanggal 20 Maret 2009
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang unit polisi berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di Darfur, Sudan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang satuan tugas unit Polisi berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi perdamaian di Darfur, Sudan

- Surat perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2126/VIII/KEP./2020 tanggal 28 agustus 2020 untuk pelaksanaan tugas sebagai kontingen satgas tugas Garuda bayangkara II Formed Police Unit (FPU) 12 T.A. 2019-2020 pada Misi pemeliharaan perdamaian PBB UNAMID di Daftur, Sudan
 - Surat Perintah Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: Sprin/1500/VI/KEP./2021 tanggal 30 juni 2021 tentang pelaksanaan tugas sebagai kontingen satgas gardah United Nations Guard Unit (UN GU) pada misi pemeliharaan perdamaian PBB UAMID di Elfasher, Sudan
 - Surat Perintah Kepala kepolisian Republik Indonesia Nomor: Sprin/3140/XII/KEP./2021 tanggal 22 desember 2021 tentang pelaksanaan perpanjangan tugas sebagai kontingen sebagai satgas Gardha United Nations Guard Unit (UNGU) pada Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB UNAMID di Elfasher/ Sudan
 - Note verbal UNAMID UN GU Nomor : DOS/OSCM/2021/0098 perihal mempersiapkan Repatriation Timeline Untuk Personal dan peralatan milik kontingen UN GU Indonesia
1. Surat elektronik Kasatgas UN GU Indonesia tanggal 30 Desember 2021 perihal Laporan Kronologis Evakuasi FPU/UMGU Indonesia

D. UNAMID (Nations African Union Hybrid Operation Mision In Darfur)

Pada tanggal 31 juli 2007 dewan keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomor 1769 yang berisikan tentang pembentukan UNAMID yang bekerja berdasarkan chapter VII dalam jangka waktu 12 bulan. Tugas UNAMID seperti tertuang dalam mandat adalah:

1. Melindungi warga sipil, memantau dan melaporkan hak asasi manusia, kekerasan berbasis seksual, gender dan pelanggaran berat terhadap anak, memfasilitasi bantuan kemanusiaan dan keselamatan serta keamanan personal misi kemanusiaan.
2. Mediasi antara pemerintah Sudan dan angkatan bersenjata yang tidak menandatangani gerakan berdasarkan DDPD.
3. Dukungan untuk mediasi konflik antara masyarakat atau Konflik lokal lainnya yang dapat merusak situasi keamanan, termasuk melalui langkah-langkah mengatasi akar masalahnya, bersama dengan Pemerintah Sudan, negara anggota PBB dan masyarakat sipil. Misi UNAMID ini berpusat di Zalingei and Area of Responsibility berada di JMTF (Jabel Marra Task Force) Area.

E. Kondisi UNAMID dan proses Evakuasi Personel.

Peroses penutupan UNAMID pada tanggal 31 Oktober 2019, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk memperpanjang mandat UNAMID hingga 31 Oktober 2020 dalam rangka transisi politik dan proses perdamaian di seluruh wilayah Sudan. Berdasarkan Resolusi 2495 tahun 2019 bahwa misi akan mempertahankan jumlah kekuatan militer dan polisi hingga 31 Maret 2020, guna menjaga menjaga semua lokasi teamsite selain kantor pusat sektor di Darfur selatan, dengan rencana penarikan yang menyusul untuk diputuskan.

Berdasarkan resolusi 2559 tahun 2020, Dewan Keamanan PBB akan mengakhiri mandat UNAMID pada tanggal 31 Desember 2020. Ini adalah puncak dari proses pertimbangan kelanjutan atas situasi di Darfur dan Sudan termasuk perkembangan yang terkait dengan proses perdamaian dan pembentuk serta kemajuan yang di buat oleh pemerintah Transisi Sudan dalam Upaya untuk Mengatasi Konflik di Darfur. Atas keputusan terbaru dewan keamanan ini berarti pada tanggal 31 Desember akan menandai berakhirnya operasi mandat UNAMID di Darfur.

Terhitung dari tanggal 1 Januari 2021, pasukan UNAMID (Military dan FPU) akan fokus pada pengamanan aktifitas penarikan personal dan aset-aset misi UNAMID memiliki waktu enam bulan untuk melakukan Drawdown yang akan dilakukan secara bertahap. Proses tersebut akan melibatkan pemulangan UN staff, Militart, IPO, Kendaraan dan peralatan lainnya, pemisahan staff internasional dan nasional serta penutupan berurut dari lokasi dan kantor serta menyerahkan ke entitas yang di tunjuk sesuai dengan aturan PBB. Proses ini akan di akhiri dengan penarikan seluruh Personel berseragam dan sipil dari Sudan pada tanggal 30 Januari 2021, dikecualikan untuk tim Likuidasi yang akan menyelesaikan penutupan administratif UNAMID

NO.	LOCATIONS	PROPOSED CLOSURE DATES
1	Khor Abeche	21 jan 2021
2	Kurum	03 feb 2021
3	Shangil Tobay	17 feb 2021
4	Saraf Umrah	03 mar 2021
5	Tawila	17 mar 2021
6	Sartoni	31 mar 2021
7	Menawashie	14 apr 2021
8	Sass	28 apr 2021

9	Nartiti	19 may 2021
10	Kalma	31 may 2021
11	Kalma II	02 jun 2021
12	Golo	16 jun 2021
13	Zalingei	30 jun 2021
14	Kabkabiya	14 juli 2021
15	El Fasher	TBC

Table penutupan Misi FPU UNAMID

Setelah proses penarikan personil berseragam dan sipil dari sudan pada tanggal 30 juni 2021, pasukan terakhir yang bertugas dalam rangka proses likuidasi UNAMID sampai dengan 31 Januari 2022 di El Fasher adalah FPU indonesia dan Pakistan. Dengan berakhirnya proses Drawdown ini, FPU Indonesia berubah nama menjadi United Nation Guard Unite.

Dengan berakhirnya mandat UNAMID pada tanggal 31 Desember 2020 dan proses drawdown pada tanggal 30 juni 2021 akan diikuti oleh proses likuidasi UNAMID sampai tanggal 31 Januari 2022 berdasarkan Statment of Unite Requirements (SUR) for Formed Police Units (FPUs) Serving With The United Nations Integrated Police Guard Unite in the African Union – United Nations Hybrid Operation In Darfur (UNAMID), Peran UNGU - Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan UN Personal di El Fasher Log Base
2. Melindungi aset-aset UN
3. Melindungi fasilitas UN dan gangguan campur tangan dari pihak lain

Pada tanggal 24 Desember 2021 telah terjadi penjarahan besar-besaran oleh masyarakat atau pengungsi di dalam UNAMID Supercamp dan menjurus pada kekacauan yang mengancam keamanan seluruh personil PBB. Setelah terjadi penjarahan besar-besaran du UNAMID Supercamp pada tanggal 27 Desember 2021 personal akan di evakuasi ke UN Base Entabe, Uganda. Personal Belonging, perlengkapan-perengkapan COE seperti senjata dan amunisi, kendaraan APC, Truck Krazz, kendaraan partoli dan lain-lain di amankan di bandara El Faser dan akan di kirim setelah evakuasi personel, sedangkan Dangerous Goods akan di kirim ke UNISFA untuk proses disposal. Keamanan akan di serahkan kepada aparat keamanan lokal dan selanjutnya dari Entabe, personel akan di atur kepulangannya ke naegara masing-masing.

Pada tanggal 19 Desember 2021 pasukan FPU Indonesia dan seluruh personal PBB telah dievakuasi ke Entabe, Uganda dan kondisi mental, fisik dan kesehatan anggota dalam keadaan baik dan sehat. Personal dievakuasi hanya dengan membawa ransel, senjata dan amunisi dengan tidak membawa personal belonging. Informasi awal pada tanggal ini, seluruh personal akan direpatriasi ke Indonesia dalam waktu 24-48 jam setelah kedatangan di Entebbe

Pada tanggal 30 Desember 2021 keadaan di El Fasher tidak kondusif sehingga personal belonging milik personal belum dapat terkirim ke Entabe, dan aset Indonesia yaitu 11 kontainer, 4 APC, 4 truck Krantz dan amunisi yang akan di disposal tidak memungkinkan untuk di kirim. Pada tanggal 31 Desember 2021 terkait update situasi di El Fasher, ASG menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai kuasa atas keributan yang terjadi di El Fasher dan pada tanggal 9 Januari 2022, pasukan FPU 12 UNAMID tiba di Jakarta dengan menggunakan pesawat Ethiopian Airlines

F. Pencapaian FPU Indonesia dalam Misi PBB UNAMID

Satgas Garuda FPU 12 UNAMID mendapatkan permintaan khusus dari PBB sebagai United Nations Guard unit (UN GU) yang bertugas untuk menjaga personel dan aset PBB selama masa Likuidasi penutupan Misi UNAMID. Hal ini merupakan suatu prestasi bagi Indonesia, menjadi salah satu FPU yang dipercaya untuk tetap berada pada misi Pemeliharaan perdamaian dunia hingga penutupan misi.

Satgas Garuda FPU 12 Unamid/ UNGU juga mendapatkan penghargaan dari pejabat misi UNAMID sebagai berikut:

1. Mendapat penghargaan dari kepala GoS (Government Of Sudan) Army Jabal Mara, Ali Adam Kuku Atas kontribusi menjaga Keamanan dengan melaksanakan patroli dan selama kegiatan tersebut perekonomian dan perdagangan berjalan dengan lancar, termasuk kontribusi dalam menjaga kesehatan dengan membagikan masker dan hand sanitizer dan kemakmuran masjid di wilayah Golo, Sudan
2. Mendapatkan penghargaan dari kepala SPF (Sudan Police Force), Jabal Mara, Ibrahim Syarif Izaldin Yusuf atas kontribusi menjaga keamanan dengan melaksanakan patroli dan selama kegiatan ini perekonomian dan perdagangan berjalan dengan lancar, termasuk kontribusi dalam menjaga kesehatan dengan membagikan masker dan hand

sanitizer dan memakmurkan masjid serta membantu meningkatkan sumberdaya manusia polisi di wilayah Golo, Sudan

3. Mendapatkan penghargaan dari Chief Of Opration Africa Union (AU), Yamane Gaseew Asnesa atas kontribusi menjaga perdamaian di daerah Darfur, Sudan
4. Mendapatkan penghargaan dari Police Commissioner UNAMID, DR. Sultan Azam Temuri, atas kontribusi menjaga perdamaian di wilayah Darfur, Sudan
5. Mendapat penghargaan dari kepala Team Refugee Agency (UNHCR), Andul Halim Fadal atas dedikasi melaksanakan pengawalan dengan penuh kedisiplinan pada saat kunjungan team UNHCR ke daerah-daerah rawan terjadi kekerasan dan kekejaman terhadap pengungsi di Golo, Sudan
6. Mendapat penghargaan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Sudan, Mohamad Kamal, atas keberhasilan terpilih menjadi United Nations Guard Unit (UNGU) menyisihkan 9 kontingen FPU dari negara lain

G. LATAR BELAKANG KONFLIK DI SUDAN

Darfur meliputi wilayah seluas 196.555 km, dengan jumlah penduduk sebanyak 6 juta jiwa. Sudan adalah salah satu negara di aftika yang memiliki dinamika konflik yang luar biasa, berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut. Konflik yang terjadi pada tahun 2003 di darfur, sudan merupakan suatu bencana kemanusiaan di mana konflik ini dipicu oleh kelompok-kelompok pemberontak yang menyerang fasilitas-fasilitas umum dan merambat kepada konflik terbuka dengan pemerintah sudan.

Kelompok pemberontak Sudan Liberation Army atau SLA menganggap bahwa pemerintah sudan hanya memenguntungkan kelompok dari warga Arab yang ada di Sudan dan mengeksploitasi warga asli keturunan Afrika yang ada di Sudan. Konflik di Daftur ini merupakan salah satu rangkaian konfli etnis yang terjadi di Sudan. Kelompok Sudan Liberation Army kemudian menyerang markas pemerintah di Golo, Jabel Merra. Penyerangan ini bertujuan agar pemerintah Sudan berlaku adil kepada seluruh warga terutama dalam permasalahan ekonomi karena selama ini warga sudah mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat sumber daya yang dikelola oleh pemerintah hanya menguntungkan pemerintah dan milisi Janjaweed.

Konflik ini berhasil di redam dengan menghasilkan Comprehensive Peace Agreement (CPA) pada tahun 2005 yang disepakati oleh Sudan Liberation Army dan pihak pemerintah Sudan. Comprehensive Peace Agreement ini memuat tentang Power Sharing, pembagian sumber daya, resolusi konflik di darfur, resolusi Konflik antara South Kordofan dan Blue Nile, Juga tentang keamanan dan genjatan senjata.

Walau demikian, Misi yang di jalankan oleh PBB ini tidak berjalan dengan baik, karena adanya penyerangan dan juga konflik yang tidak terselesaikan. Oleh karna itu PBB dan African Union sepakat untuk membentuk suatu misi gabungan yang di beri nama United Nations African Union Hybrid Operation Mision In Darfur atau yang dikenal dengan misi UNAMID pada tahun 2007.

Africa adalah salah satu benua terbesar di dunia dengan luas wiayah kurang lebih 30.300.00 kilo meter dan jumlah penduduk sekitar lima ratus juta jiwa, yang masih banyak kekuarangan dan nasib yang mayoritas menengah ke bawah, banyak sekali permasalahan yang di alami oleh afrika seperti tekanan ekonomi, perang ideologi dan suku dan pergantian pimpinan pemerintah yang tidak jelas, system politik Afrika yang tidak jelas dan kelaparan masih menjadi musuh terbesar di benua Afrika di bagian Rwanda, Uganda, Kongo, dan Burundi.

Konflik di Afrika tengah masih terjadi hingga saat ini, bagi Afrika kata-kata tentang Keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan masih lah melekat hingga saat ini, dari konflik perang yang masih berlanjut hingga saat ini di Afrika seperti Sudan, Kenya dan Somalia, daerah ini adalah daerah yang paling sulit untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan konflik. Salah satu negara di Afrika yang masih mengalami konflik bersenjata adalah Sudan tepatnya di Darfur, Sudan adalah negara yang terletak di utara Afrika, Sudan memiliki dua kelompok besar masyarakat yaitu Arab dan Afrika.

Sudan adalah negara yang memiliki 400 suku dengan logat dan Bahasa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain dan semua suku itu berbau di 26 negara bagian otonomis yang cukup besar dikarenakan Sudan menggunakan system pemerintahan Federal.

Dalam hal ini kondisi Sudan dapat dibilang memprihatinkan dikarenakan perang sipil yang telah berlarut-larut selama kurang lebih 20 abad, perang sipil pertama berakhir pada tahun 1972 namun tak bertahan lama pada tahun 1983 perang ke dua pun pecah hal ini di picu karena Ekonomi, politik yang mendominasi social dari masyarakat non-Muslim di sudan bagian

selatan, perang Sudan ke dua sangat berefek pada masalah kelaparan dan lebih dari 4 juta jiwa mengungsi sebanyak kurang lebih 2 juta orang menjadi korban dari konflik itu.

Dalam menangani konflik di Darfur PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yaitu:

1. Resolusi 1547 (2004) mengenai pembentukan U.N. Advance Mission in Sudan (UNAMIS).
2. Resolusi 1556 (2004), yang memerintahkan pemerintah Sudan melucuti senjata milisi (2005)
3. Resolusi 1585 (2005) yang memperpanjang mandat UNAMIS.
4. Resolusi 1591 (Maret 2005) mengenai larangan bepergian dan pembekuan aset para
5. Resolusi 1593 (April 2005) yang memberikan sanksi tambahan untuk Sudan, antara DK-PBB jika ingin mengirimkan peralatan militer ke wilayah Darfur. Resolusi HAM di Darfur. Janjaweed dalam waktu sebulan. Liga Arab bereaksi, meminta agar batas waktu lain embargo senjata bagi Pemerintah Sudan dan larangan pesawat Pemerintah Sudan melakukan operasi militer dan mengharuskan Pemerintah Sudan untuk melapor pada menyangkut pengajuan tersangka pelanggaran HAM ke Mahkamah Internasional. PBB pejabat Pemerintah dan pihak pemberontak yang diduga terkait dengan pelanggaran sebelumnya mengirimkan International Commission of Inquiry on Darfur (Februari) tersebut diperlonggar dan mengingatkan agar Sudan tidak bernasib seperti Irak.

Dari kedua pihak PBB dan UA telah mencoba untuk mendamaikan konflik yang ada di Darfur namun tidak mendapatkan jalan keluar. Dalam kejadian ini pihak pemerintah Sudan menyalahkan kelompok pemberontak atas terjadinya konflik yang berlarut-larut yang terjadi di Darfur yang menimbulkan banyak korban jiwa, meskipun pemerintah Sudan telah menyepakati untuk mengirimkan pasukan UNAMID ke Sudan tetapi dengan adanya konflik Sudan yang berkepanjangan akan sulit untuk mendamaikan kedua pihak.

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam anggota PBB kerap di panggil oleh PBB dalam membantu misi perdamaian dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke Darfur, Sudan. Melalui Polri Indonesia. Atas permintaan dari Sekjen jendral PBB kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap Indonesia di New York maka akan turut serta dalam misi perdamaian PBB di Darfur dengan Membentuk satuan tugas Formed Police Unite (FPU) Indonesia. Fungsi dari FPU yang diberikan oleh PBB, yaitu:

A. Preventive Diplomacy

Suatu tindakan dalam mencegah adanya suatu sengketa antara pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa dan membatasi suatu sengketa. Hal ini dilakukan oleh Dewan keamanan, PBB, Majelis Umum, dan organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB

B. Peace Making

Adalah tindakan yang membawa pihak yang sedang bersengketa untuk saling sepakat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang damai seperti yang terdapat pada Piagam PBB. PBB memiliki tujuan untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian yang menjadi kewajiban PBB untuk membawa pihak yang berseteru menuju kesepakatan secara damai.

C. Peace Keeping

Adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan pihak yang saling bersangkutan. Pada kejadian ini biasanya PBB akan mengutus perwakilan personal militer, personal sipil dan polisi PBB. Walaupun dalam konteks ini militer tetapi mereka bukanlah angkatan perang.

D. Peace Building

Tindakan yang dilakukan untuk mendukung struktur-struktur yang ada dan berguna untuk memperkuat perdamaian untuk mencegah konflik yang telah di redamkan kembali memanas, peace building dilakukan setelah terjadinya konflik. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kerja sama antara dua atau lebih yang saling menguntungkan diantara mereka hal ini akan menimbulkan kepercayaan yang merupakan syarat fundamental bagi perdamaian.

E. Peace Enforcement

Yaitu penegakan perdamaian yang berdasarkan oleh wewenang dewan keamanan berdasarkan piagam dalam menentukan adanya suatu tindakan yang berupa ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi.

Tugas dari Dewan Keamanan Nasional PBB

4. Menyelesaikan perseleisihan dengan jalan damai, seperti dengan diadakannya persetujuan suka rela ataupun paksaan dalam membuat persetujuan
5. Mengambil tindakan terhadap ancaman yang dating ataupun perbuatan yang akan menimbulkan pertikaian

Fungsi PBB dalam menjaga keamanan

1. Menjaga perdamaian di dunia internasional yang selaras dengan asas yang di anut oleh PBB
2. Menindak setiap persengketaan atau situasi yang akan menimbulkan konflik internasional
3. Mengusulkan cara untuk menyelesaikan sengketa yang ada ataupun syarat dalam penyelesaian konflik
4. Merumuskan rancangan untuk Menyusun suatu sistem yang mengatur tentang penggunaan senjata
5. Menentukan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian ataupun gerak gerik agresi dan menyampaikan usul apa yang harus di lakukan
6. Melakukan aksi militer kepada aggressor
7. Melakukan fungsi yang sesuai dengan perwakilan PBB di daerah yang strategis
8. Menyampaikan laporan tahunan kepada majelis umum
9. Mengusulkan pengangkatan seorang sekretaris jendral oleh majelis umum serta pengangkatan para Hakim dan Mahkamah Internasional

H. Masalah Penelitian

1. Apa peran FPU Indonesia di misi UNAMID ?
2. Penyelesaian konflik di Darfur, apa langkah yang di ambil PBB dan peran Formed Police Unit ?

I. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apa saja tugas Pasukan Indonesia yang di kirim dalam misi perdamaian UNAMID.
2. Mengetahui langkah apa yang di ambil oleh PBB dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Sudan.
3. Mengetahui seberapa penting pasukan FPU Indonesia di misi perdamaian UNAMID

J. Kerangka Berfikir

Afrika adalah benua yang tak pernah sepi dari kata konflik dan perang antar suku yang berkepanjangan. Tidak dipungkiri lagi bahwa Sebagian besar negara di Afrika selalu terdapat

konflik yang itu di picu dengan keadaan social, ekonomi, budaya, Pendidikan , politik dan pemerintahan yang saling bertolak belakang dengan rakyat yang akan menimbulkan konflik antara pemerintah dan pasukan pemberontak. Tetapi dalam situasi yang berkonflik tidak diimbangi dengan sarana keamanan yang memadai, itu adalah hal yang akan merugikan pemerintahan tersebut karna akan menyulitkan mereka dalam mengatasi konflik tersebut.

Dalam hal ini Indonesia mengambil peran sebagai anggota PBB yang memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dunia dengan ikut serta mengirimkan pasukan perdamaian PBB yang beranggotakan TNI dan POLRI, hal ini telah di dampai dalam:

Keterangan MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia yang dimana setelah Reformasi dalam beberapa pertimbangan MPR akhirnya menetapkan pemisahan tugas TNI dan POLRI. Setelah sekian lama Indonesia tidak mendapatkan misi perdamaian pada tahun 2008 indonesia mendapatkan mandat untuk menjalankan misi perdamaian di Darfur Sudan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisisan Indonesia dalam BAB VII tentang bantuan, Hubungan dan kerja sama pada pasala 3 ayat 3 yang berbunyi “Pasukan Polisi Republik Indonesia akan membantu secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera PBB”. Dengan dasar tersebut sesuai dengan permintaan dari sekretaris jendral PBB kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan tetap Indonesia di New York maka dengan ini Negara Republic Indonesia menindak lanjuti dengan mengirim pasukan dan Materil dalam misi perdamaian PBB di Darfur, Sudan.

Dalam UUD 1945 Alenia 4 menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan **ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dakan keadilan sosial**” dari kutipan UUD alenia 4 (sila ke 4 pancasila) maka pemerintah Indonesia memiliki suatu kehormatan besar yang di percayakan oleh masyarakat internasional kepada Indonesia dalam melakukan perdamaian di dunia internasional di bawah bendera PBB di ranah internasional.

Manfaat Magang Meliputi

K. Manfaat bagi Prodi HI

Bagi prodi HI magang di divhubinter adalah salah satu cara menjalin relasi yang baik dengan stuan Kepolisian Republik Indonesia Devisi Hubungan Internasional sesuai dengan divisi HI yaitu hubungan internasional yang tentusaja kasus yang di dapatkan selama magang di Mabes Polri bagian Divisi Hubungan internasional tentu saja membahas tentang kasus internasional contohnya seperti membahas kasus yang saya angkat menjadi bahan penelitian saya yaitu **Peran Formed Police Unite Indonesia di Misi PBB UNAMID**

L. Manfaat Untuk mitra Magang

Dapat membantu dan menaungi bahwa Indonesia memiliki kesatuan yang di naungi kusus oleh PBB langsung, bukan hanya duta besar yang dapat menjadi perwakilan Indonesia di dunia Internasional. Serta mengurus permasalahan di dunia Internasional seperti kejahatan internasional, masalah perbatasan, misi perdamaian dan masih banyak lainnya.

M. Manfaat untuk mahasiswa

Mendapat pengalaman kerja, mendapatkan bahan penelitian untuk bahan skripsi dan mengetahui bahwa tugas kepolisian Indonesia bukan hanya di dalam negri tetapi juga di ranah Internasional.